

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara geo ekonomi, dunia sedang dihadapkan oleh beberapa *the game of chicken*. Jika gagal berkompromi dari setiap permainan tersebut, maka akan berujung pada resesi global dan krisis keuangan global. Di antara permainan tersebut, yaitu perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, pertikaian antara Argentina dan *International Monetary Fund* (IMF) (Winarno, 2019). Tidak dapat dipungkiri bank sentral Indonesia masih berkiblat kepada bank sentral dunia. Menurut Nikita Indi Kumala dan Suherman Rosyidi (2017) guncangan yang terjadi pada perekonomian global menimbulkan dampak terhadap kondisi perekonomian nasional. Upaya mengurangi dampak guncangan perekonomian global terhadap perekonomian dalam negeri, dibutuhkan kebijakan efektif dan efisien baik dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya. Menjaga kestabilan rupiah menjadi tujuan Bank Indonesia. Tujuan ini sebagaimana dalam UU No. 3 tahun 2004 menyebutkan dimensi pertama kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercerimin dari perkembangan laju inflasi (Bank Indonesia, 2018).

**Tabel 1. 1**  
**Perbandingan Target Inflasi dan Aktual Inflasi**

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual (% , yoy)
2011	5±1%	3,79
2012	4,5±1%	4,30
2013	4,5±1%	8,38
2014	4,5±1%	8,36
2015	4±1%	3,35
2016	4±1%	3,02
2017	4±1%	3,61
2018	3,5±1%	3,13
2019	3,5±1%	

*Sumber: Bank Indonesia (2018)*

Melihat tabel 1.1 di atas dapat dilihat perbandingan target inflasi dan aktual inflasi, aktual inflasi selalu tidak mampu mencapai target inflasi yang telah ditetapkan. Terutama aktual inflasi pada tahun 2013-2014 yang memiliki angka yang tinggi, sangat jauh dengan target inflasi yang telah ditetapkan. Begitupun

pergerakan tingkat inflasi di Indonesia, setiap tahunnya mengalami fluktuatif dengan tren menurun. Inflasi yang jauh dari target inflasi yang ditetapkan artinya, dampak buruk yang berasal dari masalah inflasi dapat terjadi. Menurut Rozalinda (2016), inflasi mengandung implikasi bahwa berlakunya uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitung yang adil dan benar. Hal ini menyebabkan uang menjadi alat pembayaran tertunda yang tidak adil dan dan alat penyimpanan kekayaan yang tidak dipercaya. Hingga akhirnya akan merusak efisiensi sistem moneter.

Kebijakan moneter merupakan kebijakan terkait pengendalian peredaran uang di dalam perekonomian untuk menjaga stabilitas harga, inflasi yang terkendali, penyerapan tenaga kerja penuh, dan pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan (Mansur, 2013). Kerangka kebijakan moneter *inflation targeting, inflation gap* (perbedaan antara *forward looking inflation* dengan suatu target inflasi jangka menengah) menjadi salah satu indikator utama sebagai dasar utama dalam mengambil kebijakan moneter yang harus diambil (Juhro & dkk, 2018). Target inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah. Penetapan target inflasi dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan yang ditentukan untuk tiga tahun ke depan (Bank Indonesia, 2018).

Saat ini hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga. Sehingga, pergerakan pada sektor moneter lebih cepat berkembang dibandingkan dengan sektor riil. Hal ini disebabkan sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor riil (Latifah, 2015). Berdasarkan perspektif syariah, keberadaan bunga secara makro akan semakin menurunkan kinerja perekonomian. Dengan perekonomian berbasis bunga, yang terjadi hanyalah pembangunan ekonomi yang bersifat semu, volume ekonomi lebih bersifat abstrak, tidak mampu menggambarkan produktivitas dan kesejahteraan secara riil (Juhro & dkk, 2018). Terbentuknya kebijakan moneter syariah diharapkan dapat menjadi solusi dari kegagalan yang terjadi dari sistem moneter konvensional yang terpaku pada sistem bunga. Sistem bunga membawa kegiatan perekonomian dalam arah spekulasi yang akan menghambat perekonomian riil. Sehingga, pertumbuhan

ekonomi tidak mampu berdiri kuat meskipun angka pertumbuhan ekonomi cukup tinggi (Fauziah, 2015).

Teori kuantitas uang atau *quantity theory of money* merupakan suatu hipotesis tentang faktor penyebab perubahan tingkat harga. Teori kuantitas mencakup proporsionalitas jumlah uang dengan tingkat harga, mekanisme transmisi moneter, netralitas uang, dan teori uang tentang tingkat harga (Suseno & Astiyah, 2009). Inti dari teori kuantitas adalah inflasi hanya bisa terjadi jika terdapat penambahan volume jumlah uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral (Latumaerissa, 2017). Apabila penambahan jumlah uang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan produksi barang, maka nilai uang akan merosot, artinya inflasi akan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan jumlah uang yang beredar dan jumlah kredit yang meningkatkan jumlah uang yang beredar (Muana, 2001).

Uang dalam Islam adalah milik masyarakat (*money is public goods*). Oleh sebab itu, maka uang harus dapat digunakan oleh semua masyarakat tanpa ada hambatan dari orang lain dalam penggunaannya. Islam menentang perilaku menimbun komoditas kebutuhan masyarakat pada umumnya, semisal uang yang merupakan *public goods*. Hal ini dapat mengganggu orang lain dalam menggunakannya dan juga menjadikan perekonomian tidak stabil (Prasetyo, 2017). Kegiatan menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah uang yang beredar mengakibatkan tidak berjalannya perekonomian (Mahrani, Richard, & Darmayuda, 2014).

Bank Indonesia menggunakan instrumen-instrumen moneter dalam upaya mencapai sasaran operasional yang berdampak pada sasaran utamanya, yaitu inflasi (Bayuni & Srisusilawati, 2018). Inflasi yang rendah dan stabil merupakan syarat sebelum melakukan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya diakibatkan oleh sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Namun, inflasi masih cenderung bergejolak dipengaruhi oleh sisi penawaran, misalnya gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah (Bank Indonesia, 2019).

Melihat berbagai upaya BI dalam menjalankan fungsinya sebagai pemegang otoritas moneter, pada nyatanya kebijakan moneter ini belum mampu mengatasi gejala perekonomian. Hal ini terbukti pada tahun 1997 dan tahun 2008, krisis ekonomi yang terjadi telah menenggelamkan banyak bank konvensional hingga dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara itu, perbankan yang menerapkan sistem syariah masih tetap mampu eksis dan bertahan. Penyebab krisis pada saat itu, salah satunya diakibatkan karena tidak seimbangnya instrumen kebijakan moneter. Hal ini disebabkan karena kebijakan moneter yang digunakan mengutamakan suku bunga, yang nyatanya menjadi penyebab ketidakseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter (Andarini & Widiastuti, 2016). Keberadaan Bunga dapat menjadikan sektor moneter berjalan lebih cepat dibandingkan dengan aktivitas barang dan jasa, sebagai akibatnya akan menjadikan tidak stabilnya harga barang dan jasa (Juhro & dkk, 2018).

Saat terjadi inflasi, maka akan terjadi ketidakstabilan kondisi ekonomi suatu negara yang akan berakibat pada perilaku masyarakat dalam menggunakan uang. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat akan lebih memilih menggunakan uangnya untuk kegiatan konsumsi (Adim & Sukmana, 2017). Inflasi yang tinggi merupakan permasalahan utama dalam perekonomian, karena pada masa inflasi seluruh harga tidak bergerak pada tingkat yang sama atau dengan kata lain berada pada posisi harga yang relatif. Penyimpangan harga relatif dan *output* barang yang berbeda (Megasari & Widiastuti, 2017).

Islam memiliki kebijakan moneter tersendiri, aspek tujuan Islam tidak hanya pencapaian pada titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang, namun mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan. Aspek manajemen dalam kebijakan moneter Islam adalah tidak berlakunya bunga yang menjadi perbedaan yang besar dengan sistem konvensional (Wahyudi, 2013). Kebijakan moneter syariah akan sangat memungkinkan memberikan kemudahan dalam menjaga stabilitas harga. Dengan asumsi prinsip syariah dalam perekonomian terbebas dari aktivitas riba, spekulasi dan sektor moneter selalu dikaitkan dengan aktivitas produksi barang dan jasa, maka pencapaian stabilitas harga (secara teori) akan dengan mudah dicapai (Juhro & dkk, 2018). Islam mempunyai beberapa alternatif sebagai instrumen yang dapat

digunakan dalam pelaksanaan kebijakan moneter, seperti rasio bagi hasil (*profit ratio*), rasio pinjaman (*lending ratio*), rasio tabungan rekening giro (*demand deposit ratio*), rasio pembiayaan (*refinance ratio*) dan operasi pasar terbuka (Mansur, 2013). Jika instrumen kebijakan alternatif digunakan dalam menjalankan kebijakan moneter, berarti secara tidak langsung keburukan dari dampak yang ditimbulkan dari sistem bunga terhapuskan dalam Islam.

Bank Indonesia memperkenalkan instrumen moneter syariah pertama pada tahun 2000, yaitu Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI). Namun, SWBI masih bersifat pasif, sehingga pada tahun 2008 seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia mengganti SWBI dengan diterbitkannya instrumen moneter syariah yang lebih baik yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan menggunakan akad *ju'alah* (Giantara & Esya, 2015).

Dalam memperbaiki fluktuatif nilai tukar dan tingginya tingkat harga, Bank Indonesia menerbitkan beberapa instrumen moneter baik untuk perbankan konvensional maupun syariah dalam rangka memperbaiki fluktuasi nilai tukar dan tingginya tingkat harga (Megasari & Widiastuti, 2017). Saat ini, operasi pasar terbuka yang merupakan kegiatan dari operasi moneter yang dilakukan oleh BI yaitu penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk penyerapan terhadap uang-uang yang beredar di kalangan masyarakat.

Tugas utama BI tidak hanya menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan yang kaitannya dengan perbankan dan sistem pembayaran (Bayuni & Ascarya, 2010). Sistem keuangan merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya transfer keuangan antara pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Sistem tersebut terdiri atas kumpulan lembaga, pasar, instrumen, produk, jasa, praktik, dan transaksi keuangan yang sederhana maupun kompleks dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya (Simorangkir, 2014). BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Ilmiyah & Widiastuti, 2015).

Pengendalian sasaran moneter di Indonesia yaitu pengendalian inflasi dilakukan melalui operasi moneter berupa operasi pasar terbuka dan *standing facilities*. Dalam melakukan operasi moneter yang berdasarkan syariah melalui

operasi pasar terbuka Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan operasi moneter syariah melalui *standing facilities* berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). Adapun Umer Chapra (2018) menyebutkan salah satu elemen terpenting dalam penerapan kebijakan moneter syariah yaitu dengan menerapkan cadangan wajib minimum.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulizar D Sanrego, Aam Slamet Rusydiana (2013); Sugianto, Hendra Harmain dan Nurlela (2015); Nikita Indi Kumala dan Suherman Rosyadi (2017) dan Farah Fauziyah (2015) menyatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki hubungan yang negatif terhadap IHK, artinya dapat mengurangi tingkat inflasi di Indonesia. Artinya pengendalian tingkat inflasi dapat stabil menggunakan instrumen kebijakan moneter syariah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Eva Misfah Bayuni dan Popon Srisusilawati (2018); dan Sir Yesi Aprianti (2012) menunjukkan hasil bahwa Giro Wajib Minimum (GWM) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap inflasi dalam jangka pendek, artinya kenaikan GWM akan diiringi oleh kenaikan tingkat inflasi. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Misfah Bayuni dan Popon Srisusilawati (2018) menunjukkan hasil FASBIS memiliki pengaruh positif terhadap tingkat inflasi. Keberadaan instrumen kebijakan moneter syariah yang terbebas dari aktivitas riba, spekulasi dan selalu terhubung dengan aktivitas produksi barang dan jasa akan sangat memungkinkan untuk mencapai stabilitas harga. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan instrumen moneter syariah yang kemudian dijadikan variabel dalam penelitian ini.

Kebijakan moneter suatu bank sentral bertujuan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi riil dan harga (Kumala & Rosyidi, 2017). Sehingga, nilai mata uang di negaranya mampu berada pada posisi yang stabil dan ekonomi masyarakat pun tetap stabil. Asumsinya, keberadaan instrumen kebijakan moneter dapat melepas Indonesia dari sistem bunga, spekulasi, selalu menghubungkan sektor moneter dengan aktivitas produktif, dan diharapkan dapat mencapai tujuan moneter dengan lebih baik. Mengingat pentingnya hal tersebut, berdasarkan data dan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah yang diteliti atas dasar pengamatan penulis antara lain:

1. Secara geo ekonomi, dunia sedang dihadapkan oleh beberapa *the game of chicken*. Jika gagal berkompromi dari setiap permainan tersebut, maka akan berujung pada resesi global dan krisis keuangan global (Winarno, 2019). Tidak dapat dipungkiri bank sentral Indonesia masih berkiblat kepada bank sentral dunia. Menurut Nikita Indi Kumala dan Suherman Rosyidi (2017) guncangan yang terjadi pada perekonomian global menimbulkan dampak terhadap kondisi perekonomian nasional.
2. Inflasi yang terjadi pada periode tahun 2011-2018 aktual inflasi selalu tidak mampu mencapai target inflasi yang telah ditetapkan. Terutama aktual inflasi pada tahun 2013-2014 yang memiliki angka yang tinggi, sangat jauh dengan target inflasi yang telah ditetapkan. Begitupun pergerakan tingkat inflasi di Indonesia, setiap tahunnya cenderung mengalami fluktuatif dengan tren menurun.
3. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga. Sehingga pergerakan pada sektor moneter lebih cepat berkembang dibandingkan dengan sektor riil, hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor riil (Latifah, 2015).

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana kondisi tingkat inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) di Indonesia?
2. Apakah SBIS berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia?
3. Apakah GWM berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia?
4. Apakah FASBIS berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi tingkat inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari SBIS terhadap tingkat inflasi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh GWM terhadap tingkat inflasi di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh FASBIS terhadap tingkat inflasi di Indonesia.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penentuan kebijakan moneter yang diterapkan oleh otoritas moneter di Indonesia, pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam bidang moneter syariah, dan kebijakan pembangunan ekonomi bagi negara.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi bagi peneliti dan berguna bagi otoritas moneter dan pemerintah di Indonesia, serta diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.